

Berita	: Guru Honorer Madrasah Tak Dapat Tunjangan?
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Jumat, 21 September 2018

# Guru Honorer Madrasah Tak Dapat Tunjangan?

**BANDUNG, (PR).**

Sekitar 2.500 guru honorer madrasah di Kota Bandung terancam sama sekali tidak mendapatkan tunjangan pada tahun anggaran 2018. Pemerintah dan DPRD Kota Bandung mengupayakan agar dana tunjangan dapat teralokasikan dalam APBD Perubahan 2018 yang bakal segera disahkan.

Sebelumnya, guru honorer madrasah bersama-sama belasan ribu guru honorer di sekolah yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Bandung, mendapatkan tunjangan tahunan lewat pos dana hibah APBD Kota Bandung. Besarannya sekitar Rp 250.000 per bulan. Mulai tahun anggaran 2018, alokasi dana hibah dihentikan karena aturan yang tidak membolehkan pencarian dana ini secara berturut-turut.

Guru-guru honorer di sekolah di bawah Disdik Kota Bandung, jumlahnya sekitar 14.000 orang, tetap mendapatkan tunjangan lewat anggaran yang dititipkan di Disdik. Guru-guru honorer di sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Agama belum mendapatkan kejelasan. Mereka terancam kehilangan hak pendapatan.

"Kalau kita bicara besaran tunjangan, alokasi kita ini masih jauh dari layak. Masa seorang guru, seorang pendidik, diberi Rp 250.000 per bulan? Sudah sangat kecil, tahun ini tunjangan itu terancam hilang karena tidak ada yang mau menganggarkan," tutur anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Salmiah Rambe, Kamis (20/9/2018) siang.

Dijelaskan Salmiah, DPRD dan Pem-

kot Bandung saat ini sedang mengupayakan pengalokasian dana sebesar Rp 4,5 miliar dalam APBD Perubahan 2018 bagi tunjangan para guru honorer madrasah. Tidak ada masalah dengan ketersediaan dana. Yang masih jadi persoalan adalah mekanisme pencairannya.

Salmiah yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung menyatakan, alternatif pertama yang diusulkan adalah pengalokasian anggaran Rp 4,5 miliar di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung. Namun, oleh Kementerian Dalam Negeri mekanisme pengalokasian itu dinilai rawan masalah.

"Dalam konsultasi banggar dengan Kemendagri, disebutkan pengalokasian anggaran lewat kesra rawan masalah. Mekanisme ini bisa menimbulkan potensi persoalan hukum nantinya. Pemkot Bandung dan Banggar harus mencari alternatif lain," tuturnya.

Menurut Salmiah, Kemendagri menyarankan pengalokasian tunjangan guru honorer madrasah dalam pos Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.

Namun, rekomendasi itu juga belum disepakati seluruh pemangku kepentingan karena besaran tunjangan bakal mengacu pada jumlah murid di setiap sekolah.

"Besaran tunjangan per guru bakal berbeda-beda. Ini berpotensi memunculkan konflik di lapangan," katanya.

Salmiah menyatakan, Banggar DPRD Kota Bandung menyarankan agar pemkot segera melakukan konsultasi dengan Kemendagri. Diharapkan, segera muncul jalan keluar terbaik yang menguntungkan semua pihak.

Kepala Bidang Kesra Pemkot Bandung Tatang Muhtar belum bisa dimintai pendapatnya. Panggilan "PR" tidak dibalas. Lewat pesan pendek, ia mengaku tengah mengikuti sebuah geladi.

**Tidak mogok**

Kementerian Agama dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Jawa Barat mengimbau para guru tidak melakukan mogok kerja hanya karena masalah formasi CPNS. Para guru lebih baik melakukan dialog dengan pemerintah ataupun wakil rakyat di DPR untuk memperjuangkan nasib guru honorer.

"Para guru harus tetap bekerja secara profesional untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Masalah formasi CPNS yang membatasi usia pengantar maksimal 35 tahun pasti ada jalan keluarnya," kata Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag Imam Syafii, di Soeang, Rabu (19/9/2018).

Dia menambahkan, Kemenag tidak memiliki kewenangan dalam penentuan persyaratan CPNS karena semuanya ditangani Kementerian RB.

Hal senada juga ditekankan Ketua Umum AGPAI Jawa Barat Endang Zaenal yang meminta agar para guru tak melaksanakan mogok mengajar. "Banyak pihak yang akan dirugikan apabila guru melakukan mogok. Para siswa juga merasakan kerugian paling besar apalagi siswa yang akan mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir," ujarnya.

Dia mengatakan, AGPAI Jawa Barat sudah mengirimkan surat ke Kemendagri RB mempertanyakan batasan usia 35 tahun untuk mendaftar CPNS bagi guru honorer. Dia meminta pemerintah agar memberikan diskresi khusus kepada para guru honorer karena sudah mengabdikan kepada bangsa dan negara selang puluhan tahun.

Selain berkirim surat kepada pemerintah pusat, menurut Endang, AGPAI Jawa Barat juga akan menhadapi kepada komisi-komisi terkait pendidikan di DPR. **(Tri Joko Her Riadi, Sanapi)\*\*\***